

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS FISIK DI UPT RSBD PASURUAN**

Nuril Anggraeni

Program Studi Administasi Publik
Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nurilanggraeni1@gmail.com

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research aims to evaluate the social rehabilitation program as an effort to increase employment opportunities for people with physical disabilities at UPT RSBD Pasuruan. This research uses a methode descriptive qualitative approach with William N. Dunn's policy evaluation theory which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results showed that the UPT RSBD, the Social Service, as well as program benefit participants, found that the program had shown effectiveness in improving skills and employment opportunities, although the implementation of the disability work quota regulation was still not optimal. The program is also considered efficient in using the budget, sufficient in meeting the needs of participants, fair in equitable distribution of benefits, responsive to participant input, and right on target according to the needs of the world of work.

Keywords: *Policy Evaluation, Physical Disability, Social Rehabilitation, Employment Opportunities*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program rehabilitasi sosial yang sebagai upaya peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik di UPT RSBD Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak UPT RSBD, Dinas Sosial,

serta peserta manfaat program, ditemukan bahwa program telah menunjukkan efektivitas dalam peningkatan keterampilan dan peluang kerja, meskipun implementasi regulasi kuota kerja disabilitas masih belum optimal. Program juga dinilai efisien dalam penggunaan anggaran, cukup dalam memenuhi kebutuhan peserta, adil dalam pemerataan manfaat, responsif terhadap masukan peserta, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Disabilitas Fisik, Rehabilitasi Sosial, Kesempatan Kerja*

A. PENDAHULUAN

Semua orang pada dasarnya berhak atas hak dan kewajiban yang sama dalam segala situasi, tanpa memandang karakteristik fisik, warna kulit, etnis, atau agama mereka. Setiap manusia dapat menghormati hak-hak penyandang disabilitas karena hal ini berlaku baik bagi individu yang tidak memiliki keterbatasan maupun yang memiliki keterbatasan. Manusia yang terlahir dengan ketidak sempurnaan atau yang bisa dikenal dengan cacat atau tunadaksa dan orang yang tidak bisa bicara serta tidak bisa mendengar disebut dengan tuna rungu wicara. pada kenyataannya, masih ada beberapa tempat di mana diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi, termasuk di tempat kerja. Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai beban bagi masyarakat karena mereka tidak dapat bekerja sendiri. Tanpa disadari bahwa keberadaan mereka sangat dipengaruhi oleh kesalahan kecil yang berdampak besar dalam penilaian ini. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja Indonesia, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. (Lailatul Sakdiyah, 2024)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” yang dianggap sebagai penyandang disabilitas. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lailatul Sakdiyah, 2024)

Pemerintahan di Indonesia tidak hanya mengatur hak-hak penyandang disabilitas ke dalam Undang-Undang akan tetapi pemerintah juga mengatur kebijakan menurut Peraturan Daerah (PERDA) Prov. Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan agar terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan. Di dalam Undang-Undang serta kebijakan menurut Peraturan Daerah (PERDA) Prov. Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang disabilitas yang pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan agar terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan, dan penyandang disabilitas dapat memberikan arah kebijakan bahwa rehabilitasi social penyandang disabilitas merupakan upaya

untuk meningkatkan kualitas pelayanan berbasis hak dan mendorong persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas disetiap bidang kehidupan Rehabilitasi Sosial menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mensejahterahkan Penyandang Disabilitas dengan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki. Namun pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi karena masalah kesehatan mental dan fisik mereka. (Lailatul Sakdiyah, 2024)

Berdasarkan data BPS pada Tahun 2019 terdapat 12,3% dengan data penyandang cacat terdapat 360 orang, Tunanetra 251 orang, Tunarungu 190 orang, Tunawicara 201, Tunadaksa 215, Tunagrahita 265 orang, Tunalaras 196 orang, Tunarungu-wicara 189 Orang penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan di bidang industri, khususnya manufaktur, tidak mudah diakses. (Lailatul Sakdiyah, 2024) Dan Berdasarkan data terbaru penyandang disabilitas yang ada di Pasuruan tahun 2025 terdapat 21 orang disabilitas daksa, 4 orang disabilitas mental, dan 63 orang yang menderita disabilitas ganda dengan total keseluruhan yaitu 88 orang penyandang disabilitas. Maka dari itu adanya dukungan terhadap proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan penguatan dalam bentuk pengembangan potensi dan pertumbuhan iklim yang memungkinkannya untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan sebuah Panti Sosial untuk membantu para penyandang disabilitas fisik yang bernama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (RSBD) di Pasuruan, Jawa Timur. (Ratnawati, 2019)

Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap program dan kebijakan yang berjalan, untuk mengetahui apakah program telah dijalankan secara optimal dan tepat sasaran. Untuk mengatasi tantangan ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan. UPT ini memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, bordir, servis elektro, percetakan sablon, dan servis HP, dengan harapan peserta dapat mandiri secara ekonomi. Berdasarkan data, setiap tahun rata-rata terdapat 13 peserta yang lulus pelatihan, dengan sebagian kecil di antaranya melanjutkan ke dunia kerja atau membuka usaha mandiri. Program ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan agar dapat bekerja secara mandiri atau di dunia industri. Namun demikian, efektivitas dan dampak program ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya, khususnya dalam konteks peningkatan kesempatan kerja

Maka dari itu, dari permasalahan dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pengevaluasian program rehabilitasi sosial sebagai upaya peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik di UPT RSBD Pasuruan

B. KAJIAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (2001) Kebijakan Publik adalah segala tindakan pemerintah, alasan dibalik tindakan tersebut, dan dampaknya bagi kehidupan

bersama. Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973), Kebijakan Publik adalah sebagai sebuah keputusan yang tetap, yang ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat suatu kebijakan dan yang melaksanakannya. Robert Eyestone mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Lasmono, 2024)

Jadi dapat disimpulkan kebijakan publik adalah bahwa kebijakan publik adalah sebagai bentuk keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Teori Evaluasi

Definisi evaluasi menurut pendapat Norman E. Gronlund (1976) adalah proses yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian atas tujuan-tujuan pengajaran yang berlaku. Selain itu, kita juga dapat menentukan dan mengambil keputusan terkait hal tersebut (Kukrok, 2024). Michael Scriven (1967), Menurut Scriven, evaluasi adalah "proses yang menentukan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, dan membuat penilaian tentang nilai sesuatu. Brinkerhoff, dkk (1983: 1-6) Evaluasi merupakan sebuah proses yang menentukan sejauh mana tujuan dapat tercapai.

Jadi kesimpulan bahwa Evaluasi adalah proses mengumpulkan bukti untuk tercapainya dalam mengukur tujuan sejauh mana tujuan tersebut tercapai.

Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan menurut William N Dunn (2003:608-610) yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik yaitu Evaluasi Kebijakan pada prinsipnya yaitu Proses yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan, (Yanti, 2022) Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan”. (Dunn, 2003). Menurut Affrian (2020) evaluasi kebijakan adalah kegiatan mengenai estimasi atau penilaian terhadap konteks, pelaksanaan dan pengaruh pelaksanaan kebijakan tersebut. (Warman, Laili Komariyah, 2023). Anderson (1975), berpendapat bahwa evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses), dan akibatakibat (dampak) kebijakan

Jadi dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan merupakan kegiatan mengenai estimasi atau penilaian untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan atau program setelah kebijakan atau program tersebut dibuat dan diimplementasikan

Model Evaluasi Kebijakan William N Dunn

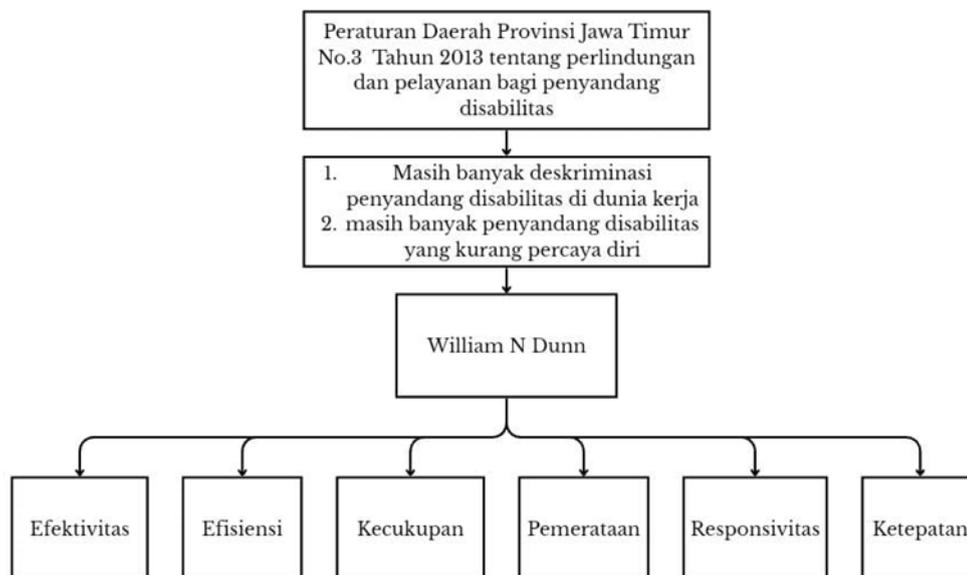
Evaluasi Kebijakan menurut William N Dunn (2003:608-610) yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik yaitu Evaluasi Kebijakan pada prinsipnya yaitu Proses yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan, (Yanti, 2022)

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang

diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan”. (Dunn, 2003).

1. Efektivitas (effectiveness) Kriteria yang diperlukan dalam proses variable pertama adalah Sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, apakah program rehabilitasi sosial berhasil meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik sesuai dengan target yang ditentukan. Dan adanya Perda Prov. Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di dalam variabel keefektifitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan.
2. Efisiensi (eficiency) Kriteria yang diperlukan dalam variabel kedua adalah Tingkat penggunaan sumber daya (waktu, dana, tenaga) yang optimal dalam mencapai hasil. Evaluasi ini melihat apakah program tersebut memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.
3. Kecukupan (adequacy) Kriteria yang diperlukan dalam proses variabel ketiga ini yaitu diukur dari Seberapa jauh hasil program dapat memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang ada. Dalam konteks ini, apakah program rehabilitasi sosial sudah cukup dalam meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik.
4. Pemerataan (equity) Kriteria yang diperlukan dalam variabel keempat merujuk pada tingkat keadilan dalam distribusi manfaat program di antara berbagai kelompok sasaran. Evaluasi ini menilai apakah semua penyandang disabilitas fisik mendapatkan akses dan manfaat yang sama dari program tersebut.
5. Responsivitas (responsiveness) Kriteria yang diperlukan dalam variable kelima adalah Kemampuan program dalam menanggapi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai masyarakat yang menjadi sasaran. Evaluasi ini melihat apakah program rehabilitasi sosial sesuai dengan harapan dan kebutuhan penyandang disabilitas fisik.
6. Ketepatan (appropriateness) Kriteria yang diperlukan dalam proses variabel keenam ini adalah sejauh mana program sesuai dengan masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi. Dalam hal ini, apakah program rehabilitasi sosial merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik.

C. KERANGKA KONSEPTUAL



D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. menurut (Sugiyono,2013). Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, disebut postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.. Adapun fokus Penelitian memiliki 6 fokus sesuai dengan teori WilliamN Dunn Yaitu: Efektifitas, Efisiensi,Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan

Lokasi penelitian di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan, di Jl. RA. Kartini, No. 292, Dermo,Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153 karena UPT tersebut adalah salah satu UPT yang dinaungi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menangani penyandang disabilitas tuna daksa di Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisa data model Miles dan Huberman (Pawito, 2008:104-106). Karena metode ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian penulis. Metode analisis data kualitatif model Miles dan Huberman membagi analisa data kualitatif menjadi tiga komponen yakni Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Efektivitas

Variabel efektivitas menurut William N Dunn adalah Sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, apakah program rehabilitasi sosial berhasil meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik sesuai dengan target yang ditentukan. Dan adanya Perda Prov. Jawa Timur No. 3

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Dan dalam variabel keefektifitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan. Digunakan untuk menilai apakah Program Rehabilitasi Sosial yang dijalankan oleh UPT RSBD Pasuruan benar-benar mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, termasuk pengelola program dan peserta manfaat, ditemukan bahwa program ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai tujuannya.

Dari hasil penyajian data yang telah disajikan dari berbagai informan yaitu Dinas sosial, UPT RSBD Pasuruan, serta Peserta Manfaat pelatihan yang ada di UPT tersebut dengan berbagai pertanyaan Wawancara dapat disampaikan bahwa kebijakan yang dibuat juga sesuai dengan kondisi yang mendukung yaitu dapat dibuktikan dengan pernyataan Bapak Hendra selaku Kepala Rehabilitasi Sosial Disabilitas yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam pengawasan terhadap kuota tenaga kerja disabilitas yang belum optimal, seperti pemerintah untuk menyediakan kuota minimal 2% dari total pegawai untuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Aturan ini dimaksudkan untuk menjamin hak dan kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor pemerintahan.

Namun, berdasarkan data infografis dari BKD Provinsi Jawa Timur:

- a. Jumlah total pegawai: 87.114 orang
- b. Jumlah ASN penyandang disabilitas: 45 orang
- c. Fisik: 27 orang
- d. Sensorik: 16 orang
- e. Mental: 2 orang

Jika dibandingkan dengan ketentuan kuota minimal 2%, maka seharusnya terdapat sekitar:

$$2\% \times 87.114 = 1.742 \text{ pegawai penyandang disabilitas}$$

Namun, saat ini baru terdapat 45 pegawai disabilitas, atau sekitar 0,05% dari total pegawai, jauh di bawah target minimal yang ditetapkan oleh regulasi.

Hal ini secara nyata memperkuat pernyataan dalam wawancara bahwa meskipun Perda No. 3 Tahun 2013 telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun kebijakannya belum optimal, khususnya dalam aspek pengawasan dan realisasi kuota penerimaan tenaga kerja disabilitas. Rendahnya proporsi ASN disabilitas menunjukkan masih adanya tantangan struktural, budaya, maupun teknis dalam memastikan inklusivitas di lingkungan kerja pemerintahan. Namun demikian, kebijakan ini sudah diarahkan dengan baik kepada kelompok sasarannya.

UPT RSBD Pasuruan juga memberikan pernyataan bahwa terkait data pada tahun 2023 peserta yang lulus dalam pelatihan ini dan melanjutkan mengikuti program magang terdapat 13 peserta. Pada 13 peserta tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu peserta yang memilih membuka usaha sendiri atau mandiri terdapat 3 orang, peserta yang memilih Kembali kepada keluarga terdapat 8 orang, dan peserta

yang dipilih lalu diterima di perusahaan terdapat 2 orang. Dan terkait data peserta lulus pada tahun 20224 terdapat 13 peserta juga. Pada 13 peserta tersebut terbagi menjadi 3 bagian juga yaitu peserta yang memilih membuka usaha sendiri atau mandiri terdapat 2 orang, peserta yang memilih Kembali kepada keluarga terdapat 7 orang, dan peserta yang dipilih lalu diterima di perusahaan terdapat 4 orang. Hal ini secara nyata disampaikan oleh informan Ibu Sri Suyanti sebagai Plt.Kasubbag Tata Usaha.

Hal ini terlihat dari keberhasilan program dalam membekali peserta dengan keterampilan yang relevan, membuka peluang kerja bagi 13 peserta yang setiap 2 tahun sekali lulus dalam melakukan pelatihan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, serta memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri dan motivasi peserta. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan regulasi secara menyeluruh, program ini telah memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran dan menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan berada pada jalur yang tepat sesuai dengan indikator efektivitas menurut William N. Dunn.

b) Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn adalah Tingkat penggunaan sumber daya (waktu, dana, tenaga) yang optimal dalam mencapai hasil. Evaluasi ini melihat apakah program tersebut memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal yang merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, dan dana) seminimal mungkin. Evaluasi efisiensi ini penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya efektif, tetapi juga menggunakan sumber daya secara optimal dan tidak boros.

Dalam konteks penelitian ini, menurut pernyataan dari Ibu Sri dan Ibu Lutfihana bahwa untuk evaluasi terhadap efisiensi difokuskan pada anggaran yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah kurang lebih Rp. 2.000.000.000,00 (2 Miliar rupiah) setiap tahunnya, dan peserta pelatihan akan mendapatkan makan 3x Sehari dengan nominal Rp. 10.000 untuk 1x makan, fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan peserta manfaat pelatihan, serta tenaga pelatih yang kompeten dalam pelaksanaan program pelatihan tersebut yang dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peserta. Meskipun terdapat kendala kecil dalam pengaturan waktu pelatihan, secara keseluruhan penggunaan sumber daya sudah optimal dan sebanding dengan hasil yang dicapai.

c) Kecukupan

Variabel Kecukupan pada evaluasi ketiga ini menurut William N Dunn yaitu diukur dari Seberapa cukup hasil program dapat memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang ada. Dalam konteks ini, apakah program rehabilitasi sosial sudah cukup dalam meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik. terhadap kecukupan penting untuk mengukur apakah kebijakan yang diterapkan sudah mencukupi dalam menjawab isu yang menjadi sasaran, dalam hal ini adalah peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak bersifat generik, tetapi telah disesuaikan dengan minat dan potensi peserta sehingga mereka merasa terbantu secara nyata dalam mengembangkan keterampilan dan kesiapan kerja.

Pada penyajian data menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial di UPT RSBD Pasuruan telah berjalan dengan tingkat kecukupan yang baik, dimana input berupa fasilitas, pelatihan, dan anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan peserta. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek pendukung lain yang berkontribusi terhadap kesiapan kerja penyandang disabilitas fisik. Dengan demikian, berdasarkan teori William N Dunn, dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial ini memiliki tingkat kecukupan yang memadai dalam memecahkan permasalahan keterbatasan akses kerja bagi penyandang disabilitas fisik, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

d) Pemerataan

Variabel Pemerataan pada variabel keempat menurut William N Dunn merujuk pada tingkat keadilan dalam distribusi manfaat program di antara berbagai kelompok sasaran. Evaluasi ini menilai apakah semua penyandang disabilitas fisik mendapatkan akses dan manfaat yang sama dari program tersebut. terhadap pemerataan penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal atau mengalami diskriminasi dalam mengakses manfaat program.

Dalam konteks penelitian ini yang ada di Penyajian Data, pemerataan ditinjau dari sejauh mana seluruh penyandang disabilitas fisik mendapatkan akses dan manfaat yang sama dalam Program Rehabilitasi Sosial di UPT RSBD Pasuruan. Serta bantuan yang diberikan secara merata kepada setiap peserta menjadi bukti bahwa proses pelatihan dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan memperhatikan tidak adanya laporan diskriminasi, adanya solusi untuk hambatan teknis yang bersifat individual seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Lutfhiana dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa Terdapat hambatan dalam akses pelatihannya seperti waktu pelatihan membordir yang seharusnya membordir menggunakan mesin. Akan tetapi dari beberapa anak ada yang kesulitan menggunakan mesinnya karena dalam membordir harus sinkron antara tangan dan kaki. Maka dari itu sebagian dari mereka yang tidak bisa membordir diganti menjadi pelatihan menyulam, karena dalam proses menyulam hanya menggunakan fokus pada tangan yang dipergunakan untuk membentuk sulamannya.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Lutfhiana bahwa Pihak UPT sudah memberikan solusi pada program pelatihan yang dilakukan dengan menyesuaikan metode pelatihan agar tetap inklusif dan dapat diakses oleh seluruh peserta. Serta adanya pendampingan yang diberikan secara adil kepada semua peserta, maka dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial di UPT RSBD Pasuruan telah memenuhi prinsip pemerataan dalam pelaksanaannya dan setiap peserta mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pelatihan serta mengembangkan keterampilan mereka tanpa hambatan struktural maupun sosial.

e) Responsivitas

Responsivitas menurut William N Dunn adalah Variabel kelima dilihat dari Kemampuan program dalam menanggapi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai masyarakat yang menjadi sasaran. Pada hal ini melihat apakah ada evaluasi secara berkala terhadap program berdasarkan masukan dari peserta dan apakah ada survey

kepuasan untuk mengetahui keberhasilan program ini dan apakah peserta diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya.

Dalam konteks penelitian ini, responsivitas dilihat dari bagaimana Program Rehabilitasi Sosial di UPT RSBD Pasuruan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik sebagai peserta manfaat. Diketahui bahwa mereka merasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan keluhan selama proses pelatihan berlangsung. Respons yang diberikan oleh pihak pendamping, khususnya oleh Ibu Lutfhiana, dinilai sangat baik dan tanggap terhadap masukan yang diberikan peserta. Hal ini mencerminkan adanya kepekaan dari pihak pelaksana program terhadap kebutuhan aktual peserta manfaat. Responsivitas ini juga terlihat dari bagaimana pihak UPT RSBD bersedia menyesuaikan pendekatan pelatihan jika terdapat hambatan atau ketidaknyamanan dari peserta, baik dalam bentuk fasilitas, metode pelatihan, maupun kondisi lingkungan pelatihan. Proses pelatihan pun dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif, di mana kebutuhan peserta menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, hasil penyajian data dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial di UPT RSBD Pasuruan telah menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi, terutama dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi peserta. Keberadaan survei kepuasan dan ruang terbuka untuk saran serta keluhan menjadi indikator nyata dari upaya peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada peserta. Hal ini sesuai dengan konsep responsivitas menurut William N. Dunn, di mana suatu kebijakan dianggap responsif apabila ia mampu merespons kebutuhan yang berkembang dalam kelompok sasaran secara langsung dan bermakna.

f) Ketepatan

Variabel keenam ini ada Evaluasi Ketepatan menurut William N Dunn adalah sejauh mana program sesuai dengan masalah atau kebutuhan yang dibutuhkan di dunia kerja dan apakah terdapat bantuan dari pihak UPT RSBD dalam mencari pekerjaan.

Dalam konteks penelitian ini, ketepatan dievaluasi melalui kesesuaian program rehabilitasi sosial dengan kebutuhan peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas fisik. Dalam hasil penyajian data ada beberapa peserta manfaat pelatihan yang memiliki keinginan untuk bekerja atau membuka usaha mandiri, dan UPT telah memfasilitasi keinginan tersebut melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau pelatihan kewirausahaan. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat formalitas, tetapi memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta manfaat, yaitu mendapatkan penghasilan mandiri atau bekerja di sektor formal.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai judul Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial sebagai Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di UPT RSBD Pasuruan dengan menggunakan enam variabel atau indikator menurut evaluasi kebijakan dari William N. Dunn.

Bahwa program ini secara umum telah berjalan dengan baik dan

memberikan manfaat yang nyata bagi peserta manfaat. Dari segi efektivitas, program terbukti mampu meningkatkan keterampilan dan sebagian peserta telah berhasil melanjutkan ke dunia kerja ataupun membuka usaha mandiri, meskipun realisasi kuota kerja bagi disabilitas masih jauh dari target yang ditetapkan. Dari sisi efisiensi, penggunaan anggaran sekitar Rp 2 miliar per tahun dinilai optimal dengan adanya fasilitas pelatihan lengkap, konsumsi harian peserta, serta tenaga pelatih yang kompeten. Pada aspek kecukupan, program telah mampu menjawab kebutuhan dasar peserta dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan minat dan potensi mereka, serta memperhatikan kesiapan kerja. Dari sisi pemerataan, seluruh peserta disabilitas fisik memperoleh perlakuan dan manfaat yang setara, dengan penyesuaian metode pelatihan berdasarkan kemampuan individu yang membuktikan adanya inklusivitas dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, dari indikator responsivitas, pihak UPT RSBD Pasuruan menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan keluhan peserta, serta tanggap dalam menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan peserta, yang mencerminkan pendekatan humanis. Terakhir, dari aspek ketepatan, program ini telah relevan dan sesuai dengan kebutuhan riil peserta dalam mempersiapkan diri untuk bekerja atau membuka usaha, dibuktikan dengan adanya kerja sama pihak UPT dengan sektor industri dan pelatihan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admintrasi. (2023). *Ikuti Pelatihan Bina Daksa, Dinsos Terjun Ke Lapangan Dampingi Penyandang Disabilitas*. Dinsos.Pasuruan Kota.Go.Id. <https://dinsos.pasuruankota.go.id/2023/03/24/ikuti-pelatihan-bina-daksa-dinsos-terjun-ke-lapangan-dampingi-penyandang-disabilitas/>
- Amelia, M., Handoko, R., Widodo, D., & Negara, A. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIDOARJO*. 39, 5.
- Angely C.M Suatan, Amran T. Naukoko, E. a. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan jumlah industri terhadap kesempatan kerja di kota manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(April), 73–84.
- Dany Mustafa, Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, E. a. (2023). Strategi Advokasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang. *JOURNAL OF DISABILITY STUDIES*, 10(01), 1–22. <https://doi.org/10.14421/ijds.100101>
- Darmawan Prasetya, E. a. (2022). *Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja : Kondisi dan Tantangannya di Indonesia sebagai negara G20*.
- Dewi, R. A. (2020). *Peran Pekerja Sosial Terhadap Penanganan Penyandang Disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) WIRAJAYA KOTA MAKASAR*.
- Dr.Nur'aini, Ms, M. E. a. (2022). *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*. 1–26.
- Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). *Jurnal Pembangunan Manusia AKSES PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEKERJAAN : KAJIAN LITERATUR*. 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027>
- Gancar Candra Premananto, C. M. E. W. (2023). *ANALISIS SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) PADA PROGRAM “ SABI BISA ” DEN GAN TEMA TOGETHER GROW STRONGER DI UPT RSBD PASURUAN*

- Gancar Candra Premananto Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Manajemen Calvin Mercy Eben. 17(1), 1756–1768. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2130>*
- Gom, J., & Parulian, G. (2021). *Policy on Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia : Quo Vadis ?* 8(1), 211–227.
- Jatim, D. (2024). *PM Pemprov Jatim-UPT RSBD Pasuruan Tingkatkan Kemampuan untuk Perbaiki Kursi RodaElektrik*. Dinsos.Jatimprov.Go.Id. <https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/pm-pemprov-jatim-upt-rsbd-pasuruan-tingkatkan-kemampuan-untuk-perbaiki-kursi-roda-elektrik>
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., Setiawan, F., & Dahlan, U. A. (2021). *Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di indonesia*. 3, 215–227.
- Kominfo, D. (2024). *Konseling Kelompok Jadi cara Peksos UPT RSBD Pasuruan selesaikan permasalahan para Penerima Manfaat*. Kominfo.Jatimprov.Go.Id. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/konseling-kelompok-jadi-cara-peksos-upt-rsbd-pasuruan-selesaikan-permasalahan-para-penerima-manfaat>
- Kukrok. (2024). *7pengertian menurut para ahli*. Kukrok.Com. <https://www.kukrok.com/2024/03/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli.html>
- Lailatul Sakdiyah, A. W. U. (2024). EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN. *Journal Publicuho*, 7(3), 1065–1076. <https://doi.org/https://doi.org/10.358717/publicuho.v7i3.458>
- Lasmono, R. (2024). *10 Definisi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Redasamudra.Id. <https://redasamudera.id/10-definisi-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>
- Literasiguru. (2024). *Pengertian Evaluasi Menurut Para Ahli*. Literasiguru.Com. <https://literasiguru.com/pengertian-evaluasi-menurut-para-ahli/>
- Musenyente, E., & Wamanga, D. (2023). Bagwere cultural interpretation of Physical-Disability Before and During Disability Inclusion. *JOURNAL OF DISABILITY STUDIES*, 10(02), 136–158. <https://doi.org/10.14421/ijds.100201>
- Nugroho, A., Rusdiana, E., & Ronaboyd, I. (2024). *Implementation of Giving Equal Opportunities and Access to Work for Employees with Disabilities in MSME : A Case in Blitar , East Java*. 11(1), 83–92. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2024.11.1.6>
- Ratnawati, S. D. (2019). *EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN ACTIVITY DAILY LIVING (ADL) PENERIMA MANFAAT DI BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA (BBRSBD) PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA SKRIPSI*. 1–97.
- Si Manis. (2024). *Kebijakan Publik – Pengertian, Ciri Ciri, Tujuan, Macam Macam, Dan Proses Perumusan Kebijakan Publik Terlengkap*.

- Pelajaran.Co.Id. <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-ciri-ciri-tujuan-macam-macam-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik/>
- Siska Novra Elvina, S. so. (2020). (2020). *PERMASALAHAN PSIKOSOSIAL DAN DAMPAKNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA: Studi Kasus Program Bimbingan Karir Bagi Penyandang Disabilitas di BRTPD Pundong, Bantul, DIY.* 167.
- Syafi, M., & Heryansyah, D. (2024). Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu : Studi di Bali dan DI Yogyakarta. *JOURNAL OF DISABILITY STUDIES*, 11(01), 64–82. <https://doi.org/10.14421/ijds.110104>
- Teguh Fajar Saputra, Dijan Rajuni, S. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2019. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(1), 37–54.
- Tsaputra, A., Padang, U. N., Pollard, E., & Bank, A. D. (2024). *Empowering Disabled Citizens in Indonesia through Inclusive Budget Planning : Balancing Rights and Responsibilities.* 11(1), 1–20.
- Tumwesigye, O., & Emong, P. (2024). Examining The Inclusion of Persons with Visual Impairment in The Formal Employment Sector in Uganda. *JOURNAL OF DISABILITY STUDIES*, 11(01), 1–22. <https://doi.org/10.14421/ijds.110101>
- Warman, Laili Komariyah, E. a. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
- Wian, A. V., Wicaksono, A. D., Herdani, B. B., Studi, P., Komunikasi, I., & Surabaya, U. N. (2022). *Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.* 509–515.
- Widadsyah, M. A., & Mada, U. G. (2024). *Enhancing Inclusive Practices in Workplaces : Perspectives from People with Disabilities.* 11(1), 93–111. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2024.11.1.7>
- Widowati, M. R. (2021). *The Role of the Government in Empowering Persons with Social Welfare with Physical Disabilities : Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Penyandang Kesejahteraan Sosial Disabilitas Tubuh.* 16, 1–4.
- Yanti, N. N. K. (2022). *Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia.* 19(2), 67–75.